

KEPIMPINAN DAN SUMBANGAN WANITA ISLAM DALAM POLITIK SEMASA

Suhailiza Md. Hamdani¹
Universitas Kebangsaan Malaysia
(E-mail: suhailiza@usim.edu.my)

Abstract

Recently, the involvement of women in politics has been increasing and their role is huge in determining the victory of a political party. This paper aims to examine the views of scholars about the leadership of Islamic women in politics. In addition, this study looks at the tendency of women's involvement in politics as it further reviews the contributions of Islamic women political leaders with reference to current political scenarios globally. This study uses qualitative methods using the major sources of al-Quran and al hadith as well as the views of conventional and contemporary scholars as well as scientific sources related to the study.

Keywords: Women, Islam, leadership, Politics.

Abstrak

Baru-baru ini, keterlibatan perempuan dalam politik telah meningkat dan peran mereka sangat besar dalam menentukan kemenangan sebuah partai politik. Tulisan ini bertujuan untuk meneliti pandangan para ulama tentang kepemimpinan perempuan Islam dalam politik. Selain itu, studi ini melihat kecenderungan keterlibatan perempuan dalam politik karena lebih lanjut meninjau kontribusi para pemimpin politik perempuan Islam dengan mengacu pada skenario politik saat ini secara global. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif menggunakan sumber-sumber utama Al-Qur'an dan al-hadis serta pandangan para sarjana konvensional dan kontemporer serta sumber-sumber ilmiah yang terkait dengan penelitian.

Kata kunci: Wanita, Islam, Kepimpinan, Politik

¹ Pensyarah di Program Dakwah Dan pengurusan Islam, Fakulti Kepimpinan Dan Pengurusan, Universiti Sains Islam Malaysia, Malaysia.

A. Pendahuluan

Penciptaan pria dan wanita dengan keistimewaan mereka sendiri memiliki kebijaksanaan besar karena mereka saling melengkapi satu sama lain. Allah membuat pria dan wanita dengan tanggung jawab yang sama untuk melakukan perintah Allah dan menghindari larangan mereka dan setiap pekerjaan yang dilakukan akan dihitung di akhirat tanpa perbedaan antara pria dan wanita. Karena itu kepemimpinan juga merupakan tanggung jawab yang juga dilakukan oleh pria dan wanita. Kepemimpinan menurut Islam tidak hanya berfokus pada pemimpin tertinggi di negara ini, tetapi kepemimpinan itu juga mencakup kepemimpinan individu atas dirinya sendiri. Kepemimpinan itu sendiri bukan pangkat yang dapat ditangkap dan dibanggakan, tetapi lebih dari kepercayaan dan tanggungjawab.²

Islam memberikan pengakuan yang tinggi kepada perempuan dibandingkan dengan agama-agama lain. Islam menjaga hak-hak perempuan dari hal-hal yang mengarah pada kehancuran dan harga diri. Peran wanita tidak terbatas pada urusan rumah tangga tetapi juga memainkan peran di negara berkembang dan memimpin orang-orang ke jalan yang disukai Allah. Ini dijelaskan dalam arti Allah SWT:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”(QS. at-Taubah: 71).

Keterlibatan perempuan dalam politik bukanlah hal baru, bahkan telah diterima secara luas sebelum kerasulan selama berabad-abad. Ini dibuktikan dalam Al-Qur'an tentang keagungan Ratu Balqis yang memerintah kerajaan Saba'.

² Razaleigh Muhamat, Kepimpinan dan Pengurusan Islam: Sejarah, Teori dan Pelaksanaan. Bagi Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, UKM, 2010.

Ini dijelaskan langsung dalam firman Allah SWT dalam surah al-Naml: 23 yang berarti:

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

“Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita (ratu Balqis) yang memerintah mereka, dan dia dianugerahkan segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar”.

Meskipun ayat ini diturunkan untuk menjelaskan keadaan bangsa Saba' yang saat itu adalah seorang penyembah matahari, ayat ini dengan jelas menggambarkan peran seorang wanita yang sangat penting dalam sistem pemerintahan negara bagian. Sejarah juga mencatat bahwa selama masa Nabi, wanita memainkan peran utama dalam menyediakan bay'ah atau kepatuhan kepada para Nabi, yaitu Saydatina Khatijah r.a. Ini sangat mempengaruhi misi Nabi

Selain itu, wanita juga terlibat dalam pembuatan keputusan seperti di dalam perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah Saw mengambil pandangan Ummu Salamah (Hindun Binti Umayyah) yang terkenal dengan ide yang bernas dalam menyusun strategi kepemimpinan. Keterlibatannya dalam politik bersama Rasulullah Saw di dalam peristiwa Perjanjian Hudaibiyah adalah ketika Rasulullah Saw dan para sahabat ingin pergi ke Mekah untuk menunaikan umrah tetapi tidak kesampaian karena diblokir oleh kaum Quraisy di Hudaibiyah. Dalam negosiasi itu, satu perjanjian telah dibuat yaitu Perjanjian Hudaibiyah yang menyebabkan Madinah tidak dapat melakukan umrah dan memasuki kota Mekah tahun itu. Keputusan Nabi (saw) menandatangani perjanjian itu tidak disetujui oleh para sahabat. Setelah itu, ia memerintahkan para sahabat untuk menyembah dan menyembelih hewan untuk membatalkan umrah tetapi teman-teman mereka menolak. Dalam situasi ini, Ummu Salamah menasihati bahwa Rasulullah sendiri mendahului pergantian pakaian ihram, bertahlul dan menyembelih hewan. Setelah melihat tindakan Nabi, maka para sahabat melakukannya. Peristiwa ini menunjukkan pandangan Ummu Salamah diterima oleh Rasulullah Saw dan bahkan wanita berperan sebagai pembantu di belakang layar, tetapi itu tetap merupakan suatu pengakuan peran perempuan dalam politik.

Contoh lain dari keterlibatan perempuan dalam urusan pemerintahan setelah zaman Nabi adalah Khairazan. Dia adalah permaisuri dari kerajaan Abbasiyah dan istrinya kepada Imam Mahdi al-Abbasi, Kalifah Bani Abbas ketiga. Dia adalah ibu dari dua putra, al-Hadi dan Harun al-Rasyid, dia selalu memberikan wawasan tentang urusan negara selama pemerintahan suaminya. Dia juga campur tangan dalam administrasi negara ketika putranya Imam al-Hadi mengadakan urusan sampai putranya tidak setuju dengan tindakan ibunya untuk membuatnya keluar dari pemerintahan. Namun, ketika Harun al-Rasyid memerintah negara itu, ia mengangkat posisi ibunya sebagai Khairazan sampai ibunya menjadi referensi untuk urusan negara.³

Selain Khairazan, tokoh politik perempuan terkenal adalah Zubaydah Binti Jaa'far, sepupu dan istri Khalifah Harun al-Rasyid (786-809 M). Dia adalah wanita cantik, pemalu, fasih dan berpikiran rasional.⁴ Dia telah memberikan pikiran yang bijaksana yang mengarahkan sekelompok anggota untuk menggali parit atau tali air dari Mesopotamia ke Mekah bernama 'ayn zubaidah.⁵ Lapisan air saat ini sedang ditinjau untuk rekonstruksi oleh pemerintah Saudi untuk tujuan pasokan air dan pelaksanaan ziarah yang nyaman. Pelaksanaan string air adalah upaya administrasi nasional yang jelas dipelopori oleh seorang wanita Islam yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.⁶

B. Penglibatan Wanita Dalam Politik Menurut Perspektif Hukum

Ada berbagai pendapat ulama dalam membahas kepemimpinan perempuan sesuai dengan perspektif hukum. Setidaknya ada dua bentuk keterlibatan perempuan dalam politik, yaitu keterlibatan langsung dan tidak langsung, atau dalam bidang fikih pembagian yurisdiksi perempuan dibagi menjadi dua wilayah yaitu 'ammah dan provinsi Khassah. Menurut Imam al-Mawardi⁷ wilayah "*Ammah*" mengacu pada keterlibatan politik yang memberikan kekuatan politik

³ Shayuthi Abdul Manas, *Apa Kata Islam Mengenai Wanita Berpolitik*, (Selangor: PTS, Publications & Distributors Sdn.Bhd, 2008)

⁴ Shayuthi Abdul Manas, *Apa Kata Islam Mengenai Wanita Berpolitik*, (Selangor: PTS, Publications & Distributors Sdn.Bhd, 2008)

⁵ 'Abd al-Muta'al Muhammad al-Jabari. *Al Mar'ah fi tasawur al-Islami*.Cet.2. Kaherah: Maktabah Wahbah. h. 35

⁶ Sharifah Hayati Syed Ismail. *Kepimpinan wanita Dalam politik dari perspektif siasah Syariyah*.Jurnal Syariah.10:2 (2002), h. 109-122.

⁷ Al-Mawardi.t.t. *al-ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

tertinggi seperti khalifah atau pos yang melibatkan seluruh masyarakat sebagai hakim, kepala militer, menteri dan lainnya.⁸ Sementara wilayah Khassah mengacu pada keterlibatan tidak langsung perempuan - ketika perempuan hanya terlibat dalam bidang politik kecil seperti membantu urusan politik sebagai administrator, kritikus dan analis politik dan tidak melibatkan keputusan tertinggi dalam masyarakat.⁹ Selain itu, juga mengacu pada kekuatan politik perempuan yang terkait erat dengan pos-pos politik seperti kepala gerakan perempuan, menteri urusan perempuan dan sejenisnya.¹⁰

Ada tiga pandangan tentang kepemimpinan perempuan dalam Fiqh Islam. Pandangan pertama tentang melihat wanita tidak memiliki hak dalam politik. Di antara argumen yang digunakan untuk memperkuat pendapat ini adalah bahwa ketentuan laki-laki adalah pemimpin (Al-Nisa 32 dan 34, Al-Baqarah: 228), larangan perempuan untuk meninggalkan rumah (Al-Ahzab: 33 dan 53), Nas Hadits kata wanita itu tidak masuk akal dan agama (HR Bukhari Muslim), Hadits Abu Bakrah, ketika Nabi tahu Persia dipimpin oleh seorang wanita, Rasulullah berkata: "Ini tidak akan senang orang-orang yang memberikan urusannya kepada wanita." (HR Bukhari-Muslim).

Pendapat kedua dari kebanyakan ulama klasik dan kontemporer adalah bahwa perempuan memiliki hak politik yang sama dengan laki-laki kecuali memegang pemerintahan (presiden), dengan alasan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam Islam (QS. Al-Baqarah: 228, Al-Hujurat: 13, Al-Taubah: 71 dan Al-Nur: 30-31). Imam al-Mawardi¹¹ dan Hasan al-Banna menjelaskan bahwa perempuan tidak diizinkan memegang kedudukan di wilayah 'ammah atau wafarah tafwid seperti khalifah, kepemimpinan militer, daerah hisbah, wilayah peradilan, wilayah ziarah dan daerah serupa yang tidak sejalan dengan sifat perempuan (Hussein, 2004)). Pendapat kedua ini juga bergantung pada Nabi, yang juga mengakui suka politik dari perempuan, seperti Ummu Hani dalam acara Fath Mekah, Nabi juga

⁸ Al-Mawardi.t.t. *al-ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993, h. 15

⁹ Sharifah Hayati Syed Ismail. Kepimpinan wanita Dalam politik dari perspektif siasah Syariyah.Jurnal Syariah.10:2 (2002), h. 109-122.

¹⁰ Sharifah Hayati Syed Ismail. Kepimpinan wanita Dalam politik dari perspektif siasah Syariyah.Jurnal Syariah.10:2 (2002), h. 109-122.

¹¹ Al-Mawardi.t.t. *al-ahkam al-Sultaniyyah*.Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

menerima bai'at perempuan. Juga menyebarkan propaganda Islam dengan tradisi hadis yang dilakukan oleh umat Islam sebagai Aisyah ra. Dengan tanggung jawab yang berat ini, para ulama sepakat untuk meletakkan syarat-syarat untuk pengangkatan kepala negara adalah laki-laki. Ibn Hazm (1970) mengatakan wanita diizinkan untuk menjadi jabatan menteri atau jabatan lain selain khalifah karena tidak ada argumen yang jelas tentang larangan tersebut. Bahkan, menurut riwayatnya Abu Bakar hanya mengacu pada jabatan Kepala Negara (Ibn Hazm, 55).

Sedangkan pendapat ketiga menganggap perempuan berhak atas politik sebagai laki-laki termasuk pemerintah. Kelompok sarjana paling kontemporer menafsirkan Hadis Abu Bakrah tentang putri Kisra, Buran, yang menjadi Raja Persia setelah kematian ayahnya: secara khusus ditujukan pada Persia yang kemudian dipimpin oleh seorang wanita, bukan jendral untuk semua ras.

“Dari Abu Bakrah, beliau berkata: Sesungguhnya Allah telah memberi manfaat dengan suatu kalimat di hari al-Jamal selepas aku berpenat bersama ahli-ahli al-Jamal dan aku berperang bersama mereka, tatkala telah disampaikan berita kepada Nabi Saw bahawa sesungguhnya orang Parsi telah melantik anaknya (anak perempuan Kisra) sebagai pemimpin mereka, bersabda Rasulullah Saw: Tidak akan mencapai kemenangan selama-lamanya sesuatu kaum yang melantik wanita untuk memimpin urusan mereka”. (HR. Bukhari, 4425).

Pendapat ini juga didasarkan pada kisah Ratu Balqis yang disebutkan dalam Al-Quran (Al-Naml: 32-34), serta realitas keberhasilan para pemimpin wanita seperti: Margareth Teacher, Indira Gandhi, Syajaratuddur yang menggerakkan pasukan Mesir ke Mesir, oleh wanita. Sedangkan al-Qardawi yang mengekspresikan interpretasi qawwam dalam (al-Nisa ': 34) hanya mencakup aspek-aspek rumah tangga. Menurut al-Qardawi itu tidak ada hubungannya dengan hak-hak perempuan dalam politik karena berbicara tentang rumah tangga. Argumen ini didukung oleh Abu Halim as-Syuqqah.¹²

Walau bagaimanapun, kemaslahatan merupakan faktor yang paling penting bagi menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan kemasyarakatan

¹² Zulqarnain Hassan & Mohamad Zaidi Abdul Rahman, *Wanita Sebagai Calon Pilihanraya*, (Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors, 2008), h. 63

dan politik.¹³ Sayyid Sheikh al-Hadi, pelopor gerakan Pemuda di Malaya, mendorong perempuan Melayu untuk melanjutkan studi mereka dan terlibat dalam politik sosial Melayu sebagaimana dibenarkan sejak 1918. Namun, situasi ini menjadi tegang ketika di tahun itu. Pada tahun 1952, komite keagamaan tertinggi di Universitas Al-Azhar telah mengeluarkan fatwa bahwa meskipun wanita dalam Islam diizinkan untuk bekerja dan memiliki pendidikan, mereka tidak diizinkan menjadi anggota Parlemen. Namun, tahun berikutnya Kepala Qadi di Mesir telah menarik fatwa tetapi dengan syarat tidak mengabaikan tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu.¹⁴

Menurut Sharifah Hayati, wanita Muslim diperbolehkan untuk aktif dalam politik ke jajaran Perdana Menteri atau Presiden di suatu negara. Para ahli sepakat bahwa wanita tidak dapat memegang posisi tertinggi (wilayah ammah) di negara tersebut tetapi hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan dalam struktur administrasi negara. Dia mengatakan: “Perempuan dapat memegang posisi tertinggi di negara itu tetapi dengan syarat mereka memiliki kemampuan. Para sarjana tidak lagi membahas apakah hukum dapat atau tidak boleh melibatkan perempuan dalam politik tetapi sejauh lingkup kekuasaan yang dapat dimiliki perempuan dalam kepemimpinan negara.” Bahkan Dr.Yusof al-Qardawi dalam bukunya *Min Fiqh al-daulah fil Muslim* memandang bahwa dalam konteks kepemimpinan dunia saat ini, ia lebih cenderung mengharuskan perempuan untuk memegang semua posisi termasuk jabatan Perdana Menteri dengan beberapa syarat:

1. Kepemimpinan perempuan adalah bahwa mereka tidak gagal mengurus anak-anak sampai dia berusia sekitar 45 tahun dan di atas adalah usia ideal untuk melakukan tugas tersebut.
2. Tidak ada pemimpin laki-laki yang lebih berkualitas pada waktu itu.
3. Jangan memutuskan secara pribadi dalam memutuskan hal-hal besar dari bangsa, bahkan harus membuat keputusan syura.

¹³ Sharifah Hayati Syed Ismail. Kepimpinan wanita Dalam politik dari perspektif siasah Syariyah. *Jurnal Syariah*.10:2 (2002), h. 109-122.

¹⁴ Faisal Othman (1993), *Women, Islam and Nation-Building*, Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn Bhd, h. 164

4. Pertahankan adab-adabs ketika keluar dari rumah untuk menutupi aurat aurat dengan sempurna.
5. Dapatkan kebenaran dari suami untuk melakukannya.

C. Kecenderungan Penglibatan Wanita Dalam Politik

Perempuan merupakan hampir 50 persen dari penduduk Malaysia dari 16,7 juta (laki-laki) dan 15,7 juta (perempuan) masing-masing. Dengan populasi sekitar 32,4 juta orang pada 2018, perempuan memiliki dampak yang signifikan terhadap arah politik dan pemerintah nasional. Pengaruh kepemimpinan perempuan dalam sistem administrasi pemerintah masih jauh dari yang diantisipasi meskipun sebagian besar perempuan mendapatkan pendidikan dan kesempatan kerja sama dengan laki-laki.

Dalam laporan International Parliament Union 2018 menyatakan ada 48 negara yang telah mencapai 30 persen wakil perempuan dalam parlemen di mana Rwanda memimpin jumlah ini dengan 61.3 persen, diikuti Kuba 53,2 persen, Bolivia 53,1 persen, Grenada 46,7 persen, Namibia 46,2 persen dan Nikaragua 45,7 persen. Di antara negara-negara, Sudan, yang merupakan negara Muslim terbesar di Afrika, berada di peringkat ke-48 dengan 30,5% anggota parlemen perempuan.

Keberhasilan negara-negara ini menambahkan partisipasi wanita dalam administrasi pemerintah adalah karena komitmen yang sangat tinggi untuk menyukseskan resolusi konvensi internasional seperti Beijing Platform for Action, The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dan Commonwealth Plan of Action. Di kawasan ASEAN, Filipina berada di garis depan dengan 29,5% di parlemen, diikuti oleh Vietnam (26,7%), Singapura (23%), Kamboja (20,3%); Indonesia (19,8%), Malaysia (10,4%) melampaui Thailand (4,8%) dan Myanmar (10,2%). Sementara jika dilihat dalam kalangan negara-negara yang memiliki populasi muslim paling banyak di dunia, ditemukan keterlibatan wakil perempuan dalam parlemen masih rendah seperti Indonesia (19,8%), Pakistan (20,6%), India (11,8%), Bangladesh (20,3%), Nigeria (5,6%).

Secara umumnya, majoriti wanita muslim yang menjadi pemimpin di dunia berasal dari negara yang juga majoriti penduduknya beragama Islam.

Beberapa pemimpin wanita muslim yang terkenal di antaranya adalah mantan Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto yang memimpin antara tahun 1988-1990 dan 1993-1996, Atifete Jahjaga yang merupakan mantan Presiden Kosovo di tahun 2011 hingga 2016, kemudian dua orang mantan Perdana Menteri Bangladesh adalah perempuan muslim yaitu Begum Khaleda Zia yang memimpin Bangladesh dari tahun 1991-1996 dan 2001-2006 dan Sheikh Hasina Wajed yang memimpin antara tahun 1996 hingga 2001 dan di tahun 2009 sehingga kini dan Megawati Soekarnoputri yang merupakan Presiden Republik Indonesia pada tahun 2001 hingga 2004, mantan Perdana Menteri Turki Tansu Ciller yang memerintah di tahun 1993 hingga 1995, mantan Perdana Menteri Senegal Mame Madior Boye yang memimpin Republik Senegal dari tahun 2001 sampai 2002, Cissé Mariam Kaïdama Sidibé yang terpilih menjadi seorang Presiden Republik di tahun 2011 hingga 2012, dan Atifete Jahjaga yang merupakan mantan Presiden Kosovo di tahun 2011 hingga 2016.

Namun, ada beberapa pemimpin wanita Muslim lainnya yang merupakan kepala negara di negara dengan mayoritas penduduk non-Muslim. Sebagai contoh adalah Halimah Yacob yang menjadi Presiden Singapura di mana mayoritas penduduknya memeluk agama Buddha dan Kristen dan Bibi Ameenah Firdaus Gurib-Fakim Presiden keenam Republik Mauritius, di mana mayoritas penduduk Mauritius menganut agama Hindu. Melihat skenario politik saat yang memperlihatkan semangat keterlibatan wanita Islam di dalam arena politik negara, sudah pasti ia ianya memberi gambaran bahwa masyarakat sudah mulai memberi kepercayaan kepada kaum wanita untuk memimpin administrasi negara.

Kecenderungan perempuan Muslim untuk terlibat dalam politik adalah karena beberapa faktor. Kesadaran politik perempuan ini dikatakan berasal dari peningkatan tingkat pendidikan dan memberikan akses ke informasi lebih lanjut. Misalnya Di Malaysia, jumlah siswa perempuan di perguruan tinggi sekarang mendekati 70 persen, serta persentase staf di sektor ketenagakerjaan melebihi 50 persen. Kinerja perempuan dalam memelopori kursi utama di pemerintah dan sektor swasta telah terbukti berhasil dalam meningkatkan kinerja departemen atau perusahaan di bawah manajemen mereka. Kualitas pemikiran wanita sekarang tidak seperti 30 tahun yang lalu. Mereka lebih pintar dan mampu bersaing dengan

semua bidang yang didominasi oleh pria. Oleh karena itu, peluang bagi perempuan untuk menyumbangkan gagasan dan energi di bidang politik perlu diperluas dengan penambahan kuota di pos-pos politik. Ini sejalan dengan Artikel 7 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang telah menyatakan bahwa keterlibatan perempuan memiliki hak yang sama untuk memilih, memegang jabatan publik dan berpartisipasi dalam masyarakat.

Selain itu, keberadaan organisasi non-pemerintah yang bertindak untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak perempuan telah membantu lebih banyak profesional perempuan dan masyarakat pedesaan untuk mengambil bagian dalam politik saat ini. Munculnya tokoh-tokoh politik perempuan baik di pemerintah atau partai oposisi telah membuat antusiasme perempuan untuk mengambil isu-isu politik. Perempuan muda yang semakin tertarik dengan politik secara teratur dimobilisasi oleh sebagian besar partai politik. Misalnya, Umno dengan Puteri UMNO menargetkan perempuan Melayu di bawah 40 tahun sebagai anggota sementara PAS menetapkan An Nisa sebagai strategi jangka panjang untuk menarik perempuan muda yang memiliki aspirasi Islam.

Oleh karena itu, partai politik mengusulkan untuk menampilkan lebih banyak kandidat perempuan dalam upaya mencapai target 30 persen anggota parlemen perempuan di negara tersebut. Saat ini, hanya 10.81 persen atau 24 dari 222 anggota Dewan Rakyat adalah perempuan, sementara di Dewan Negara, hanya 22 persen dari anggota adalah perempuan. Menurut Pemilu 14 negara bagian (GE-14), Wilayah Federal memiliki proporsi tertinggi kandidat perempuan (24 persen) diikuti oleh Perlis (15 persen), Johor (14 persen) dan Selangor (13 persen) Kelantan mencatat pencalonan perempuan yang rendah sebesar enam persen) diikuti oleh Negeri Sembilan (5 persen) dan Terengganu.

Selain itu, Perumusan Kebijakan Perempuan Nasional (DWN) pada tahun 1989 juga mengklarifikasi keseriusan pemerintah dalam membantu partisipasi perempuan dalam aliran pembangunan negara secara lebih berarti. Untuk memastikan bahwa tujuan tercapai, berbagai strategi telah dikembangkan dan di antara strategi untuk memberdayakan peran perempuan dalam politik adalah:

- a. Pemerintah harus menetapkan undang-undang dan administrasi untuk menentukan keterlibatan penuh perempuan di ranah politik negara, dan untuk meningkatkan rekrutmen, nominasi, dan penempatan perempuan dalam posisi pengaturan kebijakan di tingkat nasional, negara bagian dan lokal sampai perwakilan yang adil tercapai; dan
- b. Pemerintah juga harus menentukan dukungannya untuk munculnya lebih banyak perempuan ke tingkat legislatif dan eksekutif di Parlemen, Majelis Legislatif Negara Bagian, Pemerintah Daerah dan badan-badan lain.

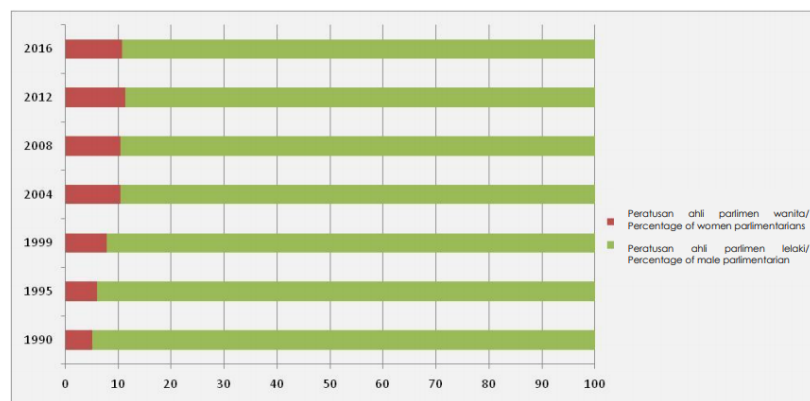
Hasil dari perumusan Kebijakan Wanita tersebut yang bertujuan memberdayakan peran wanita dalam politik, persentase anggota parlemen perempuan di Dewan Rakyat Malaysia meningkat dari 5,1 persen (1990) menjadi 10,8 persen (2016) (Sila Rujuk Gambar Berikut). Selain itu, keharusan keterlibatan perempuan dalam politik pada pandangan Islam juga membuktikan bahwa Islam juga menjelaskan tentang hak asasi bagi wanita Islam yang menjamin hak persamaan antara pria dan perempuan berdasarkan batas-batas tertentu sebagaimana yang dinyatakan di dalam surah (QS. al-Taubah: 71).

Harus ditekankan bahwa prinsip Islam tentang kesetaraan gender jelas bagi perempuan dan laki-laki; Pertama: Pria dan wanita adalah hamba Allah, Kedua: Pria dan wanita adalah khalifah Allah di muka bumi, Ketiga: Pria dan wanita berkewajiban melakukan 'amr ma'ruf dan nahi munkar, Keempat: Pria dan wanita berpotensi meraih prestasi. Islam dengan jelas memberikan hak yang sama kepada laki-laki dan perempuan dan peran yang berbeda tetapi saling melengkapi satu sama lain. Islam menempatkan wanita, apakah cowok atau menikah, sebagai suatu individu yang memiliki hak tersendiri, yaitu hak hidup (termasuk hak kebebasan berbicara, kebebasan memilih, kebebasan berpendapat, dan sebagainya berdasarkan prestasi individu wanita itu sendiri selain memiliki hak untuk memilih agamanya. Ketika dia memilih Islam, kebebasannya tunduk pada ajaran agama, dan Islam juga memberdayakan perempuan (hak sosial, hak pengetahuan, hak politik, hak ekonomi, istri, dll.). pria kepada wanita untuk dikelola sesuai kehendak wanita itu. Begitu juga setelah menikah, wanita akan terus menggunakan namanya sendiri, tanpa harus menggunakan nama suami, seperti

yang terjadi di barat. Jadi dari sudut politik, Islam mengizinkan wanita berpartisipasi politik dan memberi ruang untuk wanita menjadi pemimpin jika mampu secara fisik dan mental (Roslan, 2012). Hak-hak perempuan yang digariskan dalam Islam sangat jelas dalam mempromosikan martabat perempuan di masyarakat.

Carta 8: Komposisi Ahli Parlimen wanita di Dewan Rakyat, Malaysia, 1990-2016

Chart 8: Composition of women Parliamentarians in the House of Representatives, Malaysia, 1990 -2016



Sumber: Parlimen Malaysia, Jabatan Perdana Menteri
Source: Parliament of Malaysia, Prime Minister's Department

Apa yang lebih penting, keterlibatan wanita dalam jabatan politik sekarang terlihat sangat signifikan karena dalam era globalisasi ini terlalu banyak terjadi masalah mendesak seperti kekerasan rumah tangga, perdagangan manusia, penganiayaan terutama hak sebagai istri, gejala pembuangan bayi dan sebagainya. Melalui saluran pemerintah, perjuangan hak-hak wanita yang turut didukung oleh organisasi-organisasi non pemerintah (NGO) dapat didengar, dan dengan adanya perwakilan wanita di tingkat pembuat keputusan, diharap tindakan dapat dilakukan dengan proaktif, praktis dan efektif. Ini tentu bisa menjadi katalisator yang sangat efektif dalam upaya memberdayakan hak-hak perempuan terutama perempuan di suatu negara. Karena itu, kelebihan yang diberikan kepada perempuan harus dikembangkan untuk kemajuan komunitas. Pada kenyataannya, otoritas seorang pemimpin perlu dipoles karena tidak dapat lahir dalam sekejap mata. Untuk menghasilkan pemimpin perempuan tidak semudah itu, mereka perlu dilatih untuk memenuhi kriteria pemimpin yang termasuk sebagai 5K; karisma,

konflik, kompeten, kompetitif, dan terampil. Para pemimpin perempuan harus menjadi karisma, dalam menghadapi tuntutan pekerjaan dan bermotivasi tinggi. Mereka juga perlu berkomitmen pada tanggung jawab organisasi dan pemimpin transformasional. Para pemimpin perempuan juga harus siap untuk menghindari konflik di tempat kerja, organisasi dan komunitas. Tantangan yang dihadapi oleh pemimpin perempuan mungkin berbeda dari laki-laki dan cenderung menghadapi konflik besar penggunaan teknologi yang dibawa oleh Revolusi Industri 4.0. Selain itu, pemimpin perempuan harus memiliki kompetensi yang tinggi dalam bidang kepemimpinan mereka seperti pengadministrasian kompetensi, memahami penggunaan otomatisasi karena penggunaan teknologi terkadang memerlukan kompetensi yang tidak dapat diprediksi.

D. Sumbangan Wanita Muslimah dalam Politik Semasa

Keterlibatan politisi perempuan Muslim dalam memelopori administrasi negara telah memiliki dampak besar pada masyarakat di berbagai bidang. Peran yang dimainkan oleh politisi wanita Muslim begitu lama telah membuka mata masyarakat dunia untuk mengenali kemampuan mereka. Banyak reformasi telah berhasil dilakukan oleh para pemimpin wanita Muslim di seluruh kepemimpinan mereka, terutama dalam membantu meningkatkan kehidupan wanita.

Studi telah menemukan bahwa skenario kepemimpinan wanita yang sukses di mata dunia telah membuka babak baru ke dalam sistem administrasi negara. Perempuan telah diberi kesempatan untuk memegang beberapa portofolio di kabinet negara seperti Datuk Sri Dr. Wan Azizah (Wakil Perdana Menteri Malaysia), Datin Paduka Rafidah Aziz, Datin Paduka Zaleha Ismail dan Datuk Dr. Siti Zaharah Sulaiman. Sementara di Indonesia sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, peran perempuan dalam dunia politik sudah ada karena sejarah Indonesia mencatat seorang tokoh bernama Gayatri Rajapatni (ratu di atas segala ratu) yang meninggal pada tahun 1350 yang diyakini sebagai wanita hebat di balik kebesaran Kerajaan Majapahit. Selain itu, Megawati Soekarno (Presiden RI ke-5 dan Raden Ajeng Kartini juga seorang wanita yang terkenal dalam sejarah politik Indonesia.

Di antara peran yang disumbangkan oleh wanita Muslim di arena politik adalah sebagai berikut:

1. Memberdayakan pendidikan masyarakat

Di Malaysia, salah seorang tokoh wanita yang memperjuangkan kepentingan pendidikan khusus kepada kaum wanita adalah Tan Sri Hajah Zainun atau Ibu Zain (1903-1989). Dia memiliki kesadaran yang sangat tinggi untuk melihat lebih banyak wanita membaca dan menulis karena pengetahuan adalah kunci yang membentuk identitasnya sendiri. Semuda usia 17 tahun, Ibu Zain telah mendirikan sebuah sekolah di Pasuh Jaya, Negeri Sembilan untuk anak-anak lelaki dan perempuan atas biaya sendiri. Dengan daya juang yang tinggi, beliau merupakan salah seorang perintis UMNO dan Ketua Kaum Ibu, UMNO (sekarang Ketua Wanita UMNO). Layanan dari Ibu Zain menambahkan secara signifikan setelah pendudukan Jepang atas tanah Malaya. Dia menjalankan kegiatan dakwah bagi membantu memulihkan akhlak kaum wanita yang terpengaruh dengan tentara Jepang, selain membantu memulihkan semangat mereka yang dianiaya oleh tentara tersebut. Lebih mengejutkan lagi, ia mampu menguasai bahasa Jepang dalam waktu satu bulan.

Selain Ibu Zain, Tan Sri Fatimah Hashim (1924-2010) yang berasal dari Muar, Johor merupakan Menteri Kesejahteraan Am Malaysia antara 20 Mei 1969 sampai 28 Februari 1973 serta wanita pertama Malaysia ditunjuk sebagai Menteri Kabinet Malaysia. Antara kontribusinya dalam bidang pendidikan adalah dia telah membuka kedewasaan di rumah untuk membantu orang yang buta huruf.

Selain itu, mantan presiden wanita Bangladesh Begum Khaleda Zia yang memimpin Bangladesh dari tahun 1991-1996 dan 2001-2006 juga berfokus pada peningkatan sistem pendidikan negara dan memperluas kesempatan ekonomi yang tersedia untuk wanita. Namun, usahanya terhalang oleh badai pada tahun 1991 yang menewaskan lebih dari 130.000 orang dan menyebabkan lebih dari 2 miliar kerusakan. Sementara di Indonesia ketika era kolonialisme Belanda, Indonesia mengenal Raden Ajeng Kartini (1879-1904), ia lahir sebagai pemimpin perempuan yang memperjuangkan kebebasan dan peran perempuan melalui emansipasi dalam bidang pendidikan.

2. Mendukung usaha kemerdekaan

Di Malaysia selama konfrontasi dengan komunis, Ibu Zain adalah salah satu politisi terkemuka di negara itu yang berhasil menyatukan para ibu untuk bergabung dalam mendukung upaya tersebut. Wanita pemberani ini terdaftar sebagai tentara sukarela dan mengelola hutan sendirian. Dia pindah dari satu desa ke desa lain untuk menangkai ketidaksetiaan komunis dari penyebaran di kalangan masyarakat. Ternyata usahanya membuahkan hasil. Selain Ibu Zain, Puan Sri Datin Hajah Putih, Mariah binti Ibrahim Rashid (1914-2006) juga tokoh politik perempuan pertama yang berjuang untuk kemerdekaan. Sejak awal, ia dipercayakan dengan mengurus urusan Kaum Ibu sebelum Gerakan Kaum Ibu Umno resmi didirikan pada tahun 1946. Sering menghabiskan waktu dengan kegiatan amal serta menjadi anggota organisasi sukarela, hampir sepanjang waktu yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa menghiraukan ras dan kaum.

3. Memperjuangkan pembangunan wanita dan masyarakat

Di Malaysia, salah seorang tokoh wanita Muslimah yang lantang dan terbuka memperjuangkan supaya wanita diberikan hak suara dan ditambahkan jumlah wakil mereka di tingkat nasional adalah Puan Khatijah Sidek (1918-1982). Dia adalah pemimpin wanita UMNO yang pertama dan ia menyuarakan tuntutan tersebut di dalam konferensi Agung UMNO 1953. Sementara Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail yang merupakan Wakil Perdana Menteri Malaysia saat memperkenalkan program sukarela Insentif Suri di mana Housewives yang terdaftar di bawah program sukarela Insentif Suri bekerja sama dengan Employees Provident Fund (EPF) akan menerima kontribusi pemerintah sebesar RM40 per bulan.

Sementara itu, Mantan Presiden Pakistan Benazir Bhutto telah mendirikan First Woman Bank pada tahun 1989 dan memberi perempuan hak istimewa untuk mendapatkan pinjaman modal usaha. Dia juga mendirikan Kementerian Urusan Perempuan dan mendirikan Kantor Polisi Wanita Pertama di Dunia dan pada tahun 1994.

Selain itu, Sudan memiliki anggota parlemen wanita pertama di Afrika dan Timur Tengah (1965), menteri kesehatan wanita pertama (1974), dan hakim wanita pertama di Timur Tengah, sinematograf, tentara dan polisi. Sudan adalah negara

Arab dan negara Muslim pertama yang menunjuk perempuan sebagai hakim, pada 1960-an. Ada sekitar 67 hakim di pengadilan Sudan saat ini dan yang paling banyak di negara-negara Arab dan Muslim di dunia.

4. Membangun jaringan dan mendapatkan pengakuan internasional

Keterlibatan Datin Paduka Aishah Gani (1923-2013) dalam politik luar biasa. Dia adalah perwakilan perempuan Malaysia pertama ke Majelis Umum PBB (PBB), mantan Presiden Wanita Bangladesh ke-9 Begum Khaleda Zia yang memimpin Bangladesh dari 1991-1996 dan 2001-2006 menerima penghargaan dari Senat Negara Bagian New Jersey 2011 dengan judul "Pejuang Demokrasi". Ini adalah pertama kalinya Senat negara memberi penghargaan kepada para pemimpin asing atas kontribusinya.

5. Meningkatkan Kesehatan dan Pengembangan Fasilitas

Benazir Bhutto telah meningkatkan layanan kesehatan di mana tingkat masuk ke bangsal yang dikenakan selama rezim Zia Ul Haq dihapuskan. Benazir Bhutto juga telah memberi orang kehidupan yang lebih aman melalui layanan sambungan listrik ke 5.90.000 rumah tangga secara nasional selama setahun. Pada saat yang sama, layanan sambungan listrik juga telah ditingkatkan dalam waktu kurang dari 35 hari. Ini adalah langkah ramah-publik yang tidak pernah terjadi pada waktu itu. Selain itu, 1000 rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dibangun di Karachi.

6. Kebajikan Sosial

Mantan Presiden Pakistan Benazir Bhutto telah melakukan banyak perbaikan dan reformasi untuk memperkuat institusi keagamaan di Pakistan. Diantaranya adalah pembentukan Konvensi Ulama di semua wilayah, merestrukturisasi Dewan Ideologi Islam dan penerbangan Haji langsung dari Lahore. Selain itu, ia telah mendirikan Kementerian Pemuda dan meluncurkan skema pinjaman modal usaha kepada 10000 belia. Mantan Presiden Republik Indonesia Megawati pula telah berhasil dalam meningkatkan keamanan di beberapa wilayah sekaligus mengatasi kekerasan agama dan etnis. Megawati juga berhasil meningkatkan stabilitas politik. Di bawah pengamatan Megawati, ekonomi juga sedikit membaik, meningkat sekitar 5 persen per tahun. Angka itu

masih belum mencukupi untuk menciptakan pekerjaan yang dibutuhkan bagi jutaan penganggur.

Presiden Kosovo (Presiden Kosovo) telah memimpin upaya lembaga untuk menghidupkan kembali korban kekerasan seksual selama konflik. Pada Maret 2014, Presiden Jahjaga membentuk Dewan Nasional untuk korban kekerasan seksual selama perang di Kosovo. Badan koordinasi terdiri dari perwakilan dari kementerian utama, masyarakat sipil dan mitra internasional untuk memberikan pemulihan (langkah-langkah hukum untuk menerapkan, melindungi atau mendapatkan kembali hak-hak yang telah dipengaruhi oleh tindakan pemerintah) kepada korban kekerasan seksual selama perang. Berdasarkan informasi tentang kontribusi umat Islam dalam politik ini, penting untuk menekankan bahwa peran penting mereka adalah sebagai pengkhotbah di arena politik. Khotbah wilayah sangat luas dan politik adalah bagian dari bidang dakwah. Dakwah Politik adalah istilah kontemporer sejajar dengan dakwah yang telah memasuki dunia politik. Dakwah politik adalah dua kata yang tidak saling bertentangan dengan dakwah pada dasarnya sedangkan politik adalah obyek atau sasaran dakwah Islam. Sayyidina Usman bin Affan pernah menekankan pentingnya dakwah politik yang mafhumnya, banyak masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh Al-Quran, tetapi dapat diselesaikan dengan kekuatan (Atabik Lutfi, 2011).

Keterlibatan perempuan secara langsung dalam politik adalah salah satu medium dakwah untuk membela Islam dan untuk menegakkan Islam 'amr ma'ruf nahi munkar. Instruksi untuk mengundang yang baik dan untuk mencegah kejahatan adalah bertepatan dengan perintah Allah SWT dalam kata-katanya:

وَأَتَىٰكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. al-'Imran: 104).

Kesimpulan dari ayat ini adalah; pertama: da'i, ulama, ulama dan anggota parlemen bertanggung jawab untuk menyerukan al-Khair yang membawa manfaat dari masyarakat dan agama. Kedua: umara 'dari presiden kepada para pemimpin di

semua tingkatan bertanggung jawab untuk mengatur ma'ruf, itu semua yang dianggap baik oleh manusia dan sesuai dengan ajaran-ajaran syariah Islam. Ketiga: Penegakan hukum dan otoritas bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan menekan kejahatan. Tidak ada individu Muslim yang tidak terlibat dalam tanggung jawab *da'wah ilal-khair*, *amar ma'ruf* dan *nahy munkar*.

E. Kesimpulan

Keterlibatan perempuan sebagai pemimpin politik bukanlah kesalahan dalam pandangan Islam karena kehadiran mereka tidak untuk menyaingi atau mencocokkan laki-laki tetapi kebutuhan untuk menciptakan keseimbangan dalam pengambilan keputusan. Ini karena perempuan memiliki perspektif yang berbeda dengan laki-laki dalam perdebatan politik dan perempuan membawa pengalaman mereka sebagai penjaga bagi anak-anak dan keluarga dalam politik. Perempuan Muslim harus diberikan banyak ruang dalam kepemimpinan politik negara sesuai dengan kualifikasi dan kemampuan mereka berdasarkan panduan Islam yang jelas karena mereka bukan hanya seorang politisi negara tetapi mereka adalah pengkhotbah yang mengambil tanggung jawab besar untuk mewakili keseluruhan suara perempuan.

Daftar Pustaka

- Sharifah Hayati Syed Ismail. *Kepimpinan Wanita Dalam Politik Dari Perspektif Siasah Syariyyah*. Jurnal Syariah.10:2 Tahun 2002.
- 'Abd al-Muta'al Muhammad al-Jabari. *Al Mar'ah fi Tasawur al-Islami*. Cet.2. Kaherah:Maktabah Wahbah.
- Al-Mawardi.t.t. *al-Ahkam al-Sultaniyyah*.Beirut: Dar al-Fikr.
- Faisal Othman (1993), *Women, Islam and Nation-Building*, Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn Bhd.
- Razaleigh Muhamat@Kawangit. 2010. *Kepimpinan dan Pengurusan Islam: Sejarah, Teori dan Pelaksanaan*. Bangi: Jabtan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, UKM.
- Shayuthi Abdul Manas. 2008. *Apa kata Islam mengenai Wanita Berpolitik*. Selangor: PTS Publications & Distributors Sdn.Bhd.
- Yusof al-Qardawi . 1997.*Min Fiqh al-daulah fil Islam*. Beirut: Dar al-Syuruq
- Zulqarnain Hassan & Mohamad Zaidi Abdul Rahman (2008), *Wanita Sebagai Calon Pilihanraya*, Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors.